

INTERNALISASI BUDAYA POLITIK SANTUN KEPADA GENERASI MUDA

Bambang Trisno

Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

FKIP Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat

E-mail: bambang.trisno@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bermaksud menjelaskan tentang internalisasi budaya politik santun kepada generasi muda melalui pembelajaran PPKn. Budaya politik santun, bersih dan beretika ini diperlukan karena dapat membuat para elite politik menjauhi sikap dan perbuatan yang dapat merugikan bangsa Indonesia. Perlu dilakukan upaya penanaman suatu kesadaran bahwa politik yang hendak diperjuangkan bukan semata politik kekuasaan, melainkan suatu politik yang mengedepankan budi pekerti, dan PPKn adalah pondasi dari pelaksanaannya. Akhirnya, budaya politik santun yang akan mencetuskan ide – ide, usaha – usaha untuk memperbaiki keadaan, memberikan yang terbaik untuk orang lain.

Kata kunci: Internalisasi, Budaya, Politik Santun

PENDAHULUAN

Rutin setiap tahun persoalan PKI dan kebangkitan komunisme sering diberitakan di berbagai macam kalangan. Baik dikalangan masyarakat, pejabat, pemerintahan bahkan pelajar dan mahasiswa. Membesarnya isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) seiring semakin dekatnya waktu menuju pilkada serentak 2018 dan pemilihan presiden 2019. Begitu kuatnya stigma PKI ini menjadi senjata sangat ampuh untuk stabilitas pemerintahan, selain untuk menutupi segala lawan politik yang berusaha melucuti kekuasaan yang telah diperolehnya, juga dapat dijadikan sebagai alat untuk menjatuhkan pihak yang sedang berkuasa saat ini. Agaknya, persoalan ini telah mengorbankan dinamika politik yang sehat, yang selanjutnya muncul pribadi-pribadi yang tidak memiliki karakter dalam berpolitik. Saling hujat, saling fitnah saling menyampaikan berita yang tidak benar alias “hoax” dan lain sebagainya. Kesemuanya itu jauh dari nilai-nilai karakter yang diharapkan bangsa ini.

Padahal pendidikan karakter merupakan kunci yang sangat penting di dalam membentuk kepribadian. Selain di rumah, pendidikan karakter perlu diterapkan di sekolah, perguruan tinggi dan di lingkungan sosial. Pada hakikatnya pendidikan memiliki tujuan untuk menjadikan manusia cerdas dan tumbuh menjadi insan yang baik. Dalam rangka mempersiapkan generasi emas 2045, pemerintah menguatkan karakter generasi muda agar memiliki keunggulan dalam persaingan global abad 21. pemerintah telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIPPI) dan mengeluarkan Perpres nomor 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter untuk memberikan kepada generasi muda tidak tergerus nilai-nilai ke-Indonesiannya.

Kaum muda Indonesia adalah masa depan bangsa. Karena itu, setiap pemuda Indonesia, baik yang masih berstatus sebagai pelajar, mahasiswa, ataupun yang sudah menyelesaikan pendidikannya adalah aktor-aktor penting yang sangat diandalkan untuk mewujudkan cita-cita pencerahan kehidupan bangsa Indonesia di masa depan. Para pendiri negara Indonesia telah meletakkan dasar-dasar dan tujuan kebangsaan sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Didalamnya dimuat tentang

kepribadian bangsa. Sebagai generasi muda harapan bangsa, harus pandai menyaring dan menyampaikan informasi agar tidak memunculkan polemik ditengah-tengah masyarakat. Menjauhkan fitnah dan hujatan, berpolitik yang baik dan santun.

Kiranya itulah alasan betapa pentingnya tulisan ini, agar kaum muda, generasi muda selalu santun dalam berpolitik. Politik yang santun tentu saja muaranya adalah kebaikan. Kebaikan untuk bangsa dan negara ini, untuk semua rakyat Indonesia dan untuk dirinya sendiri. Politik harus memberi keteduhan dan kenyamanan bagi yang terlibat di dalamnya. Kemudian, bagaimana membuat orang lain mengerti.

PERUMUSAN MASALAH

Menyimak uraian di atas, muncul sebuah pertanyaan bagaimanakah sebetulnya Proses internalisasi Politik Santun kepada generasi muda?

Dengan menelisik jawaban atas masalah di atas, diharapkan tulisan ini bisa memberi wawasan kepada insan pendidikan, sehingga memahami internalisasi politik santun kepada generasi muda.

INTERNALISASI

Dalam bagian ini dibahas terlebih dahulu hakikat Internalisasi dan proses internalisasi.

1. Hakikat Internalisasi

Secara etimologis, internalisasi menunjukkan suatu proses. Dalam kaidah bahasa Indonesia akhiran-isasi mempunyai definisi proses. Sehingga internalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses. Dalam kamus besar bahasa Indonesia internalisasi diartikan sebagai penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui binaan, bimbingan dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2014 :336). Sementara Menurut Johnson (1986 : 124) internalisasi adalah “proses dengan mana orientasi nilai budaya dan harapan peran benar-benar disatukan dengan sistem kepribadian”.

Sementara menurut Chaplin (2005: 256) Internalisasi (internalization) diartikan sebagai penggabungan atau penyatuan sikap, standar tingkah laku, pendapat, dan seterusnya di dalam kepribadian. Selanjutnya Ihsan (1997:155) memaknai internalisasi sebagai upaya yang dilakukan untuk memasukkan nilai – nilai kedalam jiwa sehingga menjadi miliknya.

Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa Internalisasi hakikatnya adalah proses menanamkan sesuatu, keyakinan, sikap dan nilai-nilai yang menjadi perilaku sosial. Namun proses penanaman tersebut tumbuh dari dalam diri seseorang sampai pada penghayatan suatu nilai. Internalisasi pada diri seseorang dapat terjadi atau terkonstruksi melalui pemikiran dan hal tersebut dipengaruhi oleh norma-norma yang terjadi atau terdapat di luar dirinya. Karena Karakter seseorang sangat bergantung kepada konteks situasional. Proses internalisasi merupakan proses yang berlangsung sepanjang hidup individu, yaitu mulai saat ia dilahirkan sampai akhir hayatnya. Sepanjang hayatnya seorang individu terus belajar untuk mengolah segala perasaan, hasrat, nafsu dan emosi yang membentuk kepribadiannya.

2. Proses Internalisasi

Proses internalisasi merupakan proses yang berlangsung sepanjang hidup individu, yaitu mulai saat ia dilahirkan sampai akhir hayatnya. Sepanjang hayatnya seorang individu terus belajar untuk mengolah segala perasaan, hasrat, nafsu dan emosi

yang membentuk kepribadiannya. Perasaan pertama yang diaktifkan dalam kepribadian saat bayi dilahirkan adalah rasa puas dan tak puas, yang menyebabkan ia menangis.

Manusia mempunyai bakat yang telah terkandung di dalam dirinya untuk mengembangkan berbagai macam perasaan, hasrat, nafsu, serta emosi dalam kepribadian individunya. Akan tetapi, wujud pengaktifan berbagai macam isi kepribadiannya itu sangat dipengaruhi oleh berbagai macam stimulus yang berada dalam alam sekitarnya dan dalam lingkungan sosial maupun budayanya.

Setiap hari dalam kehidupan individu akan bertambah pengalamannya tentang bermacam-macam perasaan baru, maka belajarliah ia merasakan kebahagiaan, kegembiraan, simpati, cinta, benci, keamanan, harga diri, kebenaran, rasa bersalah, dosa, malu, dan sebagainya. Selain perasaan tersebut, berkembang pula berbagai macam hasrat seperti hasrat mempertahankan hidup.

Proses internalisasi dapat membantu seseorang mendefinisikan siapa dirinya melalui nilai-nilai di dalam dirinya dan dalam masyarakatnya yang sudah tercipta dalam bentuk serangkaian norma dan praktik. Hal ini sama halnya dengan pendapat Marmawi Rais (2012 : 10) yang menyatakan bahwa : “Proses internalisasi lazim lebih cepat terwujud melalui keterlibatan peran-peran model (*role-models*). Individu mendapatkan seseorang yang dapat dihormati dan dijadikan panutan, sehingga dia dapat menerima serangkaian norma yang ditampilkan melalui keteladanan. Proses ini lazim dinamai sebagai identifikasi (*identification*), baik dalam psikologi maupun sosiologi. Sikap dan perilaku ini terwujud melalui pembelajaran atau asimiliasi yang subsadar (*subconscious*) dan nir-sadar (*unconscious*)”.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa proses internalisasi lebih mudah terwujud melalui adanya karakter-karakter panutan (peran model), seseorang akan lebih mudah untuk menginternalisasikan sesuatu melalui peran-peran keteladanan sehingga seseorang itu bisa dengan cepat menerima serangkaian norma yang ditampilkan tersebut. Dalam psikologi, menurut Rais (2012 : 10) proses internalisasi merupakan “proses penerimaan serangkaian norma dari orang atau kelompok lain yang berpengaruh pada individu atau yang dinamai internalisasi ini melibatkan beberapa tahapan”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses internalisasi seseorang akan menerima norma-norma dari seseorang atau kelompok masyarakat lain yang berpengaruh dan akan melibatkan beberapa tahapan-tahapan. Hal itu sama halnya dengan yang disebutkan oleh pakar psikoanalisis, Freudian (dalam Rais, 2012, hlm.10) yang menyatakan bahwa beberapa tahapan-tahapan dari proses internalisasi itu yakni “tahap proyeksi (*projection*) dan introyeksi (*introjections*) yang menjadi mekanisme pertahanan”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses internalisasi terdapat beberapa tahapan-tahapan yakni tahap proyeksi dan introyeksi. Proyeksi merupakan fase awal dari introyeksi. Introyeksi mengacu kepada suatu proses dimana individu menyalin atau mereplika suatu sikap atau perilaku dari orang disekitarnya. Sebagai contoh, bila seseorang berteriak, “merdeka!”, dan teman-temannya mengikutinya berteriak „merdeka!“, teman-temanya tersebut terlibat dalam introyeksi. Hal ini biasa disebut pembelajaran sosial (*social learning*).

Di samping itu, suatu pendekatan secara psikologis diajukan oleh Lev Vigotsky (1978 : 55-56) melalui kajiannya terhadap perkembangan anak. Vigotsky melakukan pembatasan yang agak berbeda, yakni bahwa: “Internalisasi meliputi rekonstruksi internal dari suatu operasi eksternal dalam tiga tahap. Pertama, suatu operasi yang pada

awalnya merepresentasikan kegiatan eksternal yang dikonstruksi dan mulai terjadi pada tahap awal. Kedua, suatu proses interpersonal ditransformasikan ke dalam suatu proses intrapersonal. Ketiga, transformasi suatu proses interpersonal ke dalam suatu proses intrapersonal yang merupakan hasil dari suatu rangkaian perkembangan peristiwa” Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa internalisasi hakikatnya adalah sebuah proses menanamkan sesuatu, keyakinan, sikap dan nilai-nilai yang menjadi perilaku sosial. Namun proses penanaman tersebut tumbuh dari dalam diri seseorang sampai pada penghayatan suatu nilai.

Budaya Politik

Dalam bagian ini dibahas terlebih dahulu konsep budaya politik dan orientasi budaya politik.

1. Konsep Budaya Politik

Konsep budaya politik muncul dan mewarnai wacana ilmu politik pada akhir Perang Dunia II, sebagai dampak perkembangan ilmu politik di Amerika Serikat. Sebagaimana diungkapkan oleh banyak kalangan ilmuwan politik, setelah PD II selesai, di Amerika Serikat terjadi apa yang disebut revolusi dalam ilmu politik, yang dikenal sebagai Behavioral Revolution, atau ada juga yang menamakannya dengan Behaviorism. Behavioral revolution yang terjadi dalam ilmu politik adalah sebagai dampak dari semakin menguatnya tradisi atau madzhab positivisme, sebuah paham yang percaya bahwa ilmu sosial mampu memberikan penjelasan akan gejala sosial termasuk ilmu politik, seperti halnya ilmu-ilmu alam mampu memberikan penjelasan terhadap gejala-gejala alam. Paham ini sangat kuat diyakini oleh tokoh-tokoh besar sosiologi, seperti Herbert Spencer, Auguste Comte, juga Emile Durkheim (Afan Gaffar, 2004: 97).

Budaya politik merupakan pola perilaku individu dan orientasinya dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya (Rusadi Kantaprawira, 2006: 25). Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.

Budaya Politik menjadi penting untuk dipelajari dan dipahami karena ada dua sistem. *Pertama*, sikap warga negara terhadap orientasi politik yang menentukan pelaksanaan sistem politik. Sikap dan orientasi politik sangat mempengaruhi bermacam-macam tuntutan, hal yang diminta, cara tuntutan itu di utarakan, respon dan dukungan terhadap golongan elit politik, respons dan dukungan terhadap rezim yang berkuasa. *Kedua*, dengan mengerti sifat dan hubungan antara kebudayaan politik dan pelaksanaan sistemnya, kita akan lebih dapat menghargai cara-cara yang lebih membawa perubahan sehingga sistem politik lebih demokratis dan stabil (A. Rahman H.I, 2007: 269). Budaya politik selalu inheren pada setiap masyarakat yang terdiri dari sejumlah individu yang hidup dalam sistem politik tradisional, transnasional, maupun modern.

Orientasi politik tersebut dapat dipengaruhi oleh orientasi individu dalam memandang obyek-obyek politik. Almond dan Verba (1984: 16) mengajukan klasifikasi tipe-tipe orientasi politik, yaitu: 1) Orientasi kognitif, yaitu kemampuan yang menyangkut tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan individu terhadap jalannya sistem politik dan atributnya, seperti tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang

dimiliki oleh sistem politiknya, seperti ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan lagu kebangsaan negara. 2) Orientasi afektif, yaitu menyangkut perasaan seorang warga negara terhadap sistem politik dan peranannya yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu. 3) Orientasi evaluatif, yaitu menyangkut keputusan dan praduga tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Perlu disadari bahwa dalam realitas kehidupan, ketiga komponen ini tidak terpisahkan-pisahkan tetapi saling terkait atau sekurang-kurangnya saling mempengaruhi. Semisal seorang warga negara dalam melakukan penilaian terhadap seorang pemimpin, ia harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang si pemimpin.

Dalam konteks Indonesia, kiranya jelas bahwa yang dihadapi tidak hanya kemajemukan etnik dan daerah, tetapi pada saat yang bersamaan adalah "sub-budaya etnik dan daerah" yang majemuk pula. Keanekaragaman tersebut akan membawa pengaruh terhadap budaya politik bangsa. Dalam interaksi di antara sub-sub budaya politik kemungkinan terjadinya jarak, tidak hanya antar budaya politik daerah dan etnik, tetapi juga antar budaya politik tingkat nasional dan daerah. Apabila pada tingkat Nasional yang tampak lebih menonjol adalah pandangan dan sikap di antara sub-sub budaya politik yang berinteraksi. Namun pada tingkat daerah yang masih berkembang adalah "sub-budaya politik" yang lebih kuat dalam arti primordial.

POLITIK SANTUN

Menurut Yosep (2016) Membangun prinsip-prinsip berpolitik secara santun dapat dibangun dari pelbagai pemikiran filsuf seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles dapat dijadikan rujukan berpikir. Sokrates seorang filsuf yang mendasarkan pemikiran politiknya pada nilai-nilai kesantunan. Di samping itu Sokrates juga menjelaskan bahwa politik adalah the art of the possible.

Pemikiran politiknya merujuk pada konsep pembangian kekuasaan yang ideal, mengutamakan kepentingan umum, dan kesejahteraan rakyat. Berpolitik santun ala Sokrates selalu mendasarkan motif dengan keutamaan moral. Intinya, berpolitik secara santun berarti selalu berorientasi hanya pada kemaslahatan rakyat dan kemajuan negara.

Begitu pula ketika merujuk pada pemikiran Plato, yang mana Plato mendasarkan pada prinsip membangun masyarakat adalah hal yang utama dan politik adalah jalan menuju perfect society. Berpolitik secara santun harus didasari oleh prinsip-prinsip yang jelas agar tidak menimbulkan bias kesantunan politik. Prinsip politik santun dapat berjalan jika setiap pasangan calon menanamkan prinsip objektivitas, rendah hati dan open mind.

Cara-cara berpolitik santun harus dikembangkan dan disampaikan kepada masyarakat, terutama pada generasi muda agar nilai ke-Indonesiannya tidak hilang. Untuk itu, pemerintah telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIPI) dan mengeluarkan Perpres nomor 87/2017 tentang Pendidikan tentang Penguatan Pendidikan Karakter untuk memberikan kepada generasi muda tidak tergerus nilai-nilai ke-Indonesiannya.

Nilai-nilai ke-Indonesiaan, yakni nilai kesopanan, kesantunan, semua terkandung dalam ideologi Pancasila harus terus disampaikan pada generasi muda, bagaimana mengenai kerukukunan, bagaimana persaudaraan, bagaimana mengenai toleransi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan generasi muda saat ini tidak hanya menerima pendidikan dari guru dan orang tua, tetapi juga dari media sosial. Yang mendidik generasi sekarang ini bukan dari guru dan orang tua saja, tetapi lebih banyak oleh media sosial. Kekuatan keterbukaan kekuatan media sosial sekarang mempengaruhi sekali dari semua aspek baik ekonomi, politik maupun sosial, dan ini yang harus kita antisipasi.

Oleh karena itu politik santun dan beretika merupakan gambaran demokrasi yang baik. Demokrasi yang substansi perlu etika, lebih dari tata cara dan prosedur. Perkembangan kehidupan demokrasi yang santun dan beretika akan memberikan kontribusi pada pengembangan kehidupan bernegara dan berbangsa. Kemajuan demokrasi akan runtuh jika tidak diikuti kehidupan demokrasi yang santun dan beretika.

Fenomena kebebasan yang kebablasan terlihat jelas ketika dalam konteks pertarungan politik terlihat adanya pembunuhan karakter diantara pasangan calon yang ada. Tentu hal tersebut menimbulkan efek yang negatif khususnya kepercayaan publik di negeri ini. Untuk menghindari efek negatif tersebut setiap politisi haruslah mengedepankan politik secara santun.

Membangun prinsip-prinsip berpolitik secara santun dapat dibangun dari pelbagai pemikiran filsuf seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles dapat dijadikan rujukan berpikir. Sokrates seorang filsuf yang mendasarkan pemikiran politiknya pada nilai-nilai kesantunan. Di samping itu Sokrates juga menjelaskan bahwa politik adalah *the art of the possible*.

Pemikiran politiknya merujuk pada konsep pembangian kekuasaan yang ideal, mengutamakan kepentingan umum, dan kesejahteraan rakyat. Berpolitik santun ala Sokrates selalu mendasarkan motif dengan keutamaan moral. Intinya, berpolitik secara santun berarti selalu berorientasi hanya pada kemaslahatan rakyat dan kemajuan negara. Begitu pula ketika merujuk pada pemikiran Plato, yang mana Plato mendasarkan pada prinsip membangun masyarakat adalah hal yang utama dan politik adalah jalan menuju perfek society. Berpolitik secara santun harus didasari oleh prinsip perinsip yang jelas agar tidak menimbulkan bias kesantunan politik. Prinsip politik santun dapat berjalan jika setiap pasangan calon menanamkan prinsip objektivitas, rendah hati dan open mind. Objektivitas mampu membawa pada suatu kebenaran absolut. Seperti halnya Sokrates yang menanamkan nilai bahwa “tidak semua kebenaran itu bersifat relatif namun banyak diantaranya bersifat absolut“. Kemampuan untuk melihat kebenaran secara objektif mampu menjadi prinsip awal berpolitik secara santun. Kemudian, setiap pasangan calon harus menanamkan rasa rendah hati, artinya tidak mau menang sendiri.

Perbedaan pendapat itu wajar, namun jangan sampai pada pemaksaan kehendak. Sikap rendah hati dapat menghindari pasangan calon dari sifat sombong dan angkuh. Prinsip yang terakhir adalah open mind, memiliki pengertian mampu berpikir terbuka sehingga mau menerima pendapat ataupun keritik dari berbagai pihak termasuk dari lawan politik sekalipun.

Mengedepankan politik secara santun sejatinya memiliki pengertian saling berlomba menjadi yang terdepan “number one“ dalam memperjuangkan setiap kebenaran yang dipercaya. Tentunya, kebenaran tersebut seharusnya bukan mengenai jabatan atau kedudukan, tetapi sebuah kemaslahatan bersama, entah siapa saja yang menjadi pemenang dalam pertarungan pemilihan kepala daerah ini.

Politik santun merupakan salah satu cara dalam meredam konflik, baik konflik tingkat elit politik maupun konflik pada masyarakat akar rumput. Santun dalam

berpolitik dan dengan pendewasaan politik melalui strategi merangkul lawan politik guna meraih dukungan simpatisannya.

PROSES INTERNALISASI BUDAYA POLITIK SANTUN

Seperti yang telah disinggung pada pembahasan diatas, bahwa proses internalisasi pada dasarnya tidak hanya didapatkan dari keluarga, melainkan juga didapat dari lingkungan. Lingkungan yang dimaksud tersebut adalah lingkungan sosial. Secara tidak sadar generasi muda telah dipengaruhi oleh berbagai tokoh masyarakat, seperti kyai, usztad, guru, dan lain-lain. Dari situlah kita dapat memetik beberapa hal yang kita dapatkan dari mereka yang kemudian kita menjadikannya sebagai sebuah kepribadian dan kebudayaan kita.

Internalisasi budaya politik santun merupakan suatu proses penanaman nilai tentang budaya berpolitik yang baik, beretika dan berkesesuaian dengan nilai-nilai pacasila. Dalam penanaman dan penumbuhkembangan nilai tersebut dilakukan melalui berbagai didaktik-metodik pendidikan dan pengajaran, seperti pendidikan, pengarahan indoktrinasi, brain-washing, dan lain sebagainya.

Pendidikan dan pengajaran dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif karena pendidikan membangun generasi baru bangsa yang lebih baik. Sebagai alternatif yang bersifat preventif, pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kualitas generasi muda bangsa dalam berpolitik yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah budaya dan karakter bangsa. Memang diakui bahwa hasil dari pendidikan akan terlihat dampaknya dalam waktu yang tidak segera, tetapi memiliki daya tahan dan dampak yang kuat di masyarakat. Misalnya melalui sebuah materi pembentukan karakter sebuah bangsa yang dimana di dalamnya membahas tentang sebuah nilai-nilai budaya yang dapat diintegrasikan sebagai pembelajaran.

Dalam proses pembelajaran, tahapan internalisasi yang dikaitkan dengan politik santun, ada tiga tahap yang mewakili proses atau tahap terjadinya internalisasi, sebagaimana diungkapkan Muhaimin, (1996:153), yaitu:

1. Tahap Transformasi Nilai : Tahap ini merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menginformasikan nilai-nilai yang baik dan kurang baik. Pada tahap ini hanya terjadi komunikasi verbal.
2. Tahap Transaksi Nilai : Suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan komunikasi dua arah, atau komunikasi yang bersifat interaksi timbal-balik.
3. Tahap Transinternalisasi : Tahap ini jauh lebih mendalam dari tahap transaksi. Pada tahap ini bukan hanya dilakukan dengan komunikasi verbal tapi juga sikap mental dan kepribadian. Jadi pada tahap ini komunikasi kepribadian yang berperan secara aktif.

Jadi, Internalisasi merupakan sentral proses perubahan kepribadian yang merupakan dimensi kritis pada perolehan atau perubahan diri manusia, termasuk di dalamnya pemribadian makna (nilai) atau implikasi respon terhadap makna.

Prinsip pembelajaran yang digunakan dalam proses penanaman budaya politik santun kepada generasi muda dengan proses pendidikan budaya dan karakter bangsa mengusahakan agar generasi muda mengenal dan menerima nilai-nilai budaya dan karakter bangsa sebagai milik mereka dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri. Dengan prinsip ini, generasi muda dapat belajar melalui proses berpikir, bersikap, dan berbuat. Ketiga proses ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan generasi muda dalam

berpolitik dan mendorong mereka untuk melihat diri sendiri sebagai makhluk sosial. Dengan begitu, penanaman budaya politik santun tersebut akan: *Pertama*, mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif generasi muda sebagai manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang santun. *Kedua*, Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religious. *Ketiga*, Mengembangkan kehidupan budaya politik yang jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan.

PENUTUP

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa internalisasi budaya politik santun merupakan suatu proses penanaman nilai tentang budaya berpolitik yang baik, beretika dan berkesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam penanaman dan penumbuhkembangan nilai tersebut dilakukan melalui banyak proses, dan proses yang dianggap preventif adalah penanaman melalui pendidikan dan pengajaran. Dalam pendidikan dan pembelajaran ada tiga tahap proses internalisasi yaitu; tahap transformasi nilai, tahap transaksi nilai dan tahap transinternalisasi nilai. Melalui proses tersebut generasi muda dapat belajar melalui proses berpikir, bersikap, dan berbuat.

Demikian uraian dan kesimpulan tulisan ini. Semoga ini bisa membantu pendidik dalam memahami dan menganalisis perkembangan kognitif dan sosioemosional siswa serta implikasinya dalam pembelajaran, dan bisa pula memberikan tambahan pengetahuan dan bermanfaat bagi insan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel A dan Sidney Verba. 1984. *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Bina Aksara. Jakarta.
- Afan Gaffar. 2004. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- A. Rahman.H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Chaplin, J P. (2005). *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta : Rajawali Pres.
- Ihsan,Ihsan. 1997. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka cipta.
- Johnson, Doyle P. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jilid 1 dan 2. Diterjemahkan oleh Robert M.Z. Lawang. Jakarta: Gramedia.
- Kantraprawira Rusadi. 2006. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. 2014. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhaimin. 1996. *Strategi Belajar Mengajar*. Surabaya: Citra Media.
- Perpres nomor 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Yosep Wuwur. 2016. Politik Santun dalam Pilkada. <https://www.weeklyline.net/jurnal/20161118/politik-santun-dalam-pilkada.html> (Diakses Pada 25 November 2017).